



Analisis Dampak Non-Migas Indonesia Setelah Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Monica Wulandari^{b,1*}, Annisa Nurliza^{b,2}, Fitri Khairunnisa^{b,3}, Citra Amalia Riyadlul Jannah^{b,4}.

^b Sarjana Terapan Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
^{1*} monicawlnr20@gmail.com, ² annisanurliza20@gmail.com, ³ nisafitri995@gmail.com, ⁴ citrarjannah@gmail.com,

*corresponding e-mail: citrarjannah@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest Nickel producing countries in the world. This is the background of the Indonesian government accelerating the implementation of the nickel ore export ban, with considerations to maintain the sustainability of nickel raw materials from existing smelters. The Indonesian government also opens the following opportunities by providing convenience in terms of licensing and also facilities (privileges) to investors related to investment, both domestic and foreign. The method used is a literature study with a method of collecting library data, or research whose research objects are explored through a variety of literature information (books, google scholars, documents, and scientific journals). The result of his research is that Indonesia can prove that there is still a large enough supply of nickel ore from countries in the world, besides Indonesia, Indonesia does not prohibit the export of nickel that has been processed and refined, so that the world's nickel-based goods producers will not lose raw materials, but only reduce one production chain, Indonesia needs to ensure adequate supply for domestic needs, especially for smelters who have invested in Indonesia.

Keywords : Export Ban, Nickel Ore, Raw Materials.

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Hal ini menjadi latar belakang pemerintah Indonesia mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel, dengan pertimbangan untuk menjaga keberlanjutan bahan baku nikel dari smelter yang sudah ada. Pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan berikut juga dengan memberikan kemudahan dari segi perizinan dan juga fasilitas-fasilitas (*Privilege*) kepada investor terkait penanaman modal baik itu dari dalam negeri ataupun asing. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepastakaan (buku, google scholar, dokumen, dan jurnal ilmiah). Hasil dari penelitiannya adalah Indonesia bisa membuktikan bahwa masih cukup besarnya pasokan bijih nikel dari negara-negara di dunia, selain Indonesia, Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang telah diolah dan dimurnikan, sehingga produsen barang berbasis nikel dunia tidak akan kehilangan bahan baku, melainkan hanya mengurangi satu rantai produksinya saja, Indonesia perlu memastikan kecukupan pasokan bagi kebutuhan domestik, terutama bagi pelaku smelter yang telah berinvestasi di Indonesia.

Kata kunci : Larangan Ekspor, Bijih Nikel, Bahan Baku.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan deposit nikel sebesar 4 juta metric Ton dari 80 juta metric ton cadangan nikel dunia, menempatkan Indonesia di posisi ke-6 sebagai negara penghasil Nikel terbesar di dunia. Data yang saat ini tercatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Indonesia memiliki cadangan nikel nasional sebesar 698 juta ton. Angka tersebut diperkirakan hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bagi fasilitas pemurnian selama 7-8 tahun ke depan,

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
sedangkan kebutuhan bijih nikel nasional diperkirakan mencapai angka 20 juta ton pada tahun 2020. Hal ini menjadi latar belakang pemerintah Indonesia mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel, dengan pertimbangan untuk menjaga keberlanjutan bahan baku nikel dari smelter yang sudah ada (Agung & Adi, 2022).

Pelarangan ekspor bukan bertujuan menghambat perdagangan, namun bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Kebijakan pelarangan tidak dapat ditunda karena kekayaan mineral khususnya nikel dapat habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentunya menimbulkan kontra di dalam pelaksanaannya terutama bagi investor asing karena secara otomatis harga jual nikel yang berasal dari Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Namun dengan diterbitkannya peraturan ini tidak semata-mata membuat laju Investasi ke Indonesia menjadi terhambat. Pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan berikut juga dengan memberikan kemudahan dari segi perizinan dan juga fasilitas-fasilitas (*privilege*) kepada investor terkait penanaman modal baik itu dari dalam negeri ataupun asing. Saat ini Indonesia masih membutuhkan pendanaan terkait pembangunan *smelter* (pemurnian), pembangunan PLTU sebagai penggerak utama dari mesin pengolah nikel, tenaga ahli serta pelatihan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pengolahan nikel dengan baik yang tentunya membutuhkan dana yang sangat banyak. Dalam rangka percepatan ekonomi dan pembangunan pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan mewajibkan semua perusahaan tambang di Indonesia untuk mengolah hasil tambang dan melarang ekspor bahan mentah guna menaikkan harga pasar di Internasional dan menambah devisa negara dengan kedepannya lebih meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (Brier & lia dwi jayanti, 2020b).

B. Metode Penelitian

Memapa Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode studi literatur atau *riview literature*. Studi literatur adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yang merupakan serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, google scholar, dokumen, dan jurnal ilmiah). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan didalam literatur yang berorientasi akademik (*academic oriented literature*) serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tiga puluh enam jurnal mengenai analisis dampak non migas indonesia setelah kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kemudian dari jurnal tersebut akan dianalisis dengan cara membandingkan/komparasi. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi data barang tambang dan mineral yang bergerak di pertambangan bijih nikel meliputi data produksi barang tambang mineral dan data nilai ekspor non migas pada tahun 2019-2021.

C. Hasil Penelitian

Dari 36 jurnal maupun artikel yang dipilih untuk *review* penelitian, semua yang dipilih untuk dibaca dengan cermat dari abstrak, tujuan, data analisis mengenai dampak non migas Indonesia setelah kebijakan larangan ekspor biji nikel.

No	Judul/Peneliti/Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Kaitan Dengan Penelitian
1	Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia /Nugroho, Ario Seno /2022	Penelitian ini menggunakan pendekatan General Equilibrium yang dilakukan dengan aplikasi computer	kebijakan pengetatan ekspor bahan baku nikel mentah sebesar 100% kenaikan pajak ekspor nikel mentah, menghasilkan penurunan produktivitas sektor tambang nikel mentah Indonesia, peningkatan produktivitas sektor manufaktur Indonesia, dan peningkatan ekspor sektor manufaktur Indonesia, serta kenaikan produksi manufaktur Uni Eropa (Nugroho, 2022).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang dampak kebijakan pengetatan ekspor bahan baku nikel.
2	Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization/Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika/2023	Penelitian yang bersifat deskriptif analitis	Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan penghentian ekspor bijih Nikel ke Eropa dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa yang mendahuluinya, yaitu adanya kebijakan Uni Eropa untuk memberhentikan kegiatan ekspor dan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, yang didukung oleh kebijakan yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel yang berbahan dasar minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa. Namun demikian apabila Uni Eropa menggugat	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang latar belakang gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan penghentian ekspor bijih Nikel ke Eropa.

			kebijakan penghentian ekspor bijih nikel ke Eropa, Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan dari WTO sendiri khususnya pengecualian dalam Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus mampu memberikan bukti bahwa kebijakannya tersebut merupakan kebijakan yang tidak merugikan negara Uni Eropa, karena bukan hanya Indonesia saja penghasil Nikel akan tetapi juga negara lain masih mampu memberikan pasokan ke Eropa (Yosefi, 2023).	
3	Pengaruh Perubahan Harga Nikel dan Nilai Kurs Terhadap Pembagian Dividen Pada PT. Vale Indonesia, Tbk/ Fachriyahthul Jannah, Husnul Muamilah, Marshadan Ina Yulianadewi/2023	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan pada PT. Vale Indonesia, Tbk	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Harga nikel secara parsial berpengaruh terhadap pembagian dividen (<i>dividend per share</i>). Hal ini berarti ketika harga nikel meningkat ataupun melemah, maka akan mempengaruhi pembagian <i>dividen Perseroan</i> (Fachriyahthul Jannah, Husnul Muamilah, 2023).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh perubahan harga nikel terhadap fluktuasi harga nikel dunia selama beberapa tahun terakhir
4	Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif/ Azis, Vicky Alvian Abdul Abrianti, Sharda/2021	Metode Penelitian normative	Dari hasil analisis terhadap suatu permasalahan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah sebagai upaya peningkatan value added dan untuk memastikan pasokan cadangan nikel bagi bahan baku pada smelter nikel telah sesuai dengan amanat Pasal 103 ayat (1) jo (Azis & Abrianti, 2021).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah sebagai upaya peningkatan value added dan untuk memastikan pasokan cadangan nikel bagi bahan baku.

5	Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa/Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S & Adam Surya, S.H./2022	metode normatif	yuridis	Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ten tang Agreement on Establishing the World Trade Organization/ WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) menimbulkan konsekuensi baik secara eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternalnya ialah Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO (Dr. Atik Krustiyati, S.H. & Adam Surya, 2022).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia.
6	Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dalam Perdagangan Internasional/Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak, Aloysius Deno Hervino./2022	metode normatif	yuridis	Nikel termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga pertimbangan Indonesia melarang ekspor nikel dapat diajukan dengan alasan selain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, juga dimaksudkan untuk konservasi sumber daya mineral dan pelestarian lingkungan dalam kerangka sustainable development (Puspita et al., 2022).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai sumber daya alam nikel yang tidak dapat diperbarui sehingga pelarangan ekspor nikel diajukan untuk melestarikan lingkungan dalam kerangka pembangunan keberlanjutan.
7	Pengelolaan Nikel Indonesia Terhadap Pertahanan Negara Dan Ketahanan Energi/Nurbaiti, M. Sidik Boedoyo, Purnomo Yusgiantoro/2022	Metode kualitatif		Nikel adalah logam penting bagi masyarakat kita. Negara-negara berkembang bergantung pada tembaga dan nikel untuk pembangunan infrastruktur mereka. Nikel juga merupakan elemen kunci untuk transisi ke produksi energi listrik bebas fosil, yang dapat menyebabkan peningkatan	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai manfaat nikel Untuk mendukung ketahanan energi, nikel kadar rendah dibutuhkan dalam komponen baterai baik baterai kendaraan listrik maupun energy storage, perannya yaitu dapat

				permintaan untuk logam ini. Nikel sangat penting dalam produksi besi tahan karat. Produksi tahunan nikel tumbuh dengan cepat (Nurbaiti, M. Sidik Boedoyo, 1945).	mengurangi ketergantungan impor BBM.
8	Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif/ Azis, Vicky Alvian Abdul Abrianti, Sharda/2021	Metode Penelitian normatif	Dari hasil analisis terhadap suatu permasalahan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah sebagai upaya peningkatan value added dan untuk memastikan pasokan cadangan nikel bagi bahan baku pada smelter nikel telah sesuai dengan amanat Pasal 103 ayat (1) (Azis & Abrianti, 2021).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah sebagai upaya peningkatan value added dan untuk memastikan pasokan cadangan nikel bagi bahan baku.	
9	Pengaruh Pelarangan Ekspor Nikel Terhadap Rentabilitas Ekonomi PT Vale Indonesia, Tbk dari Tahun 2015 – Juni 2020/Humala Situmorang/2021	Metode kuantitatif	Dari hasil penelitian ditemukan bahwa palarangan ekspor biji nikel berpengaruh negatif terhadap variabel gross profit margin, net profit margin, return on asset dan return on equity untuk tahun 2015 sampai tahun 2017, namun untuk tahun 2018 hingga Juni 2020 pelarangan biji nikel tidak berpengaruh negatif terhadap variabel gross profit margin, net profit margin, return on asset dan return on equity (Desya, 2017).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pengaruh dari palarangan ekspor biji nikel	
10	Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia/ Muhammad Agung dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi/2022	metode penelitian yuridis normatif	Pelarangan ekspor Ore nikel bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Kebijakan pelarangan tidak dapat ditunda karena kekayaan mineral khususnya nikel dapat habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Dengan	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang dampak dari Pelarangan ekspor ore nikel sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019.	

			dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentunya menimbulkan kontra di dalam pelaksanaannya terutama bagi investor asing karena secara otomatis harga jual nikel yang berasal dari Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Namun dengan diterbitkannya peraturan ini tidak semata-mata membuat laju Investasi ke Indonesia menjadi terhambat (Agung & Adi, 2022).	
11	The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law/Reygina Yenny Mitrania, Manotar Tampubolon, Edward M. L. Panjaitan/2021	metode penelitian hukum normatif	Indonesia sebagai negara pengekspor bijih nikel dapat melakukan pembatasan kuantitatif untuk mencegah penipisan Nikel yang merupakan produk penting negara yang juga termasuk bahan mineral tidak dapat diperbarui. Kemudian pengecualian larangan pembatasan kuantitatif, yaitu pengecualian larangan pembatasan kuantitatif, dapat dilakukan jika negara pengekspor melakukannya untuk melindungi neraca pembayaran asingnya (Mitrania et al., 2021).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai alasan indonesia melakukan pembatasan ekspor bijih nikel karena untuk mencegah penipisan nikel yang merupakan produk pertambangan yang tidak dapat diperbarui
12	Restriction of Indonesian Nickel Ore Export Based on The Perspective Of Quantitative Restriction Principle In General Agreement On Tariffs And Trade/Doan Mauli Tua Siahaan, Ibrahim Sagio, Evi Purwanti/2021	metode penelitian hukum normatif	peraturan menteri dikeluarkan untuk melindungi sumber daya nikel Indonesia yang semakin menipis, sementara smelter nikel yang dibangun di Indonesia semakin banyak. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan nikel Indonesia diperkirakan	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Kementerian ESDM memperkirakan bijih nikel bertahan hingga 2029, sehingga bijih nikel digunakan untuk dikonsumsi dalam negeri oleh karena itu Indonesia melakukan pembatasan

			akan bertahan hingga 2029 saja. Pasalnya, konsumsi nikel dalam negeri Indonesia diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan smelter dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan pembatasan ekspor bijih nikel untuk menyimpan cadangan nikel agar tidak terjadi kelangkaan (Siahaan et al., 2021).	ekspor bijih nikel agar tidak terjadi kelangkaan
13	Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence from the Announcement Effect / Byungkwon Lim, Hyeon Sook Kim, Jaehwan Park / 2021	Metode Kualitatif	Mengidentifikasi urutan dua episode di mana larangan ekspor bijih nikel Indonesia tampaknya mencoba menaikkan harga nikel LME. Dampak larangan ekspor Indonesia dalam hal CFE pada tahun 2014 agak lebih besar dibandingkan tahun 2019. Guncangan di pasar nikel LME pada tahun 2014 berlanjut setelah peristiwa tersebut (Lim et al., 2021).	Membahas mengenai larangan ekspor bijih nikel akan mencapai dua tujuan yaitu meningkatkan nilai tambah dan mengurangi tingkat ekstraksi sumber daya nikelnya. Perhatikan bahwa pemerintah Indonesia mengumumkan pelonggaran larangan tersebut pada awal tahun 2017. Mereka menunjukkan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia mewakili pertaruhan yang signifikan dalam hal nilai ekspor, nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan pemerintah
14	Gugatan Eu Di Wto Terkait Kasus Ekspor Bijih Nikel Indonesia/Yehezkiel /2021	deskriptif kualitatif	Pada dasarnya setiap negara terkhususnya Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang di WTO berhak mengolah sendiri kekayaan sumber daya alamnya melalui smelter dengan tujuan meningkatkan peluang keuntungan dan juga lowongan pekerjaan yang	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Indonesia ingin mengolah sendiri kekayaan sumber daya alam melalui smelter untuk meningkatkan peluang keuntungan dan lowongan pekerjaan

			didasarkan pada peraturan ekspor dan impor, asalkan mensyaratkan setiap negara anggota harus mempublikasikan semua peraturan-peraturan yang menyangkut ekspor dan impor (Yehezkiel, 2021).	
15	<i>The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis</i> /Andante Hadi Pandyaswargo, Alan DwiWibowo, Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, Hiroshi Onoda 5 / 2021	wawancara dan menghadiri seminar dengan pakar nasional dan pemain kunci di industri	Tindakan untuk mencari bahan alternatif dan melindungi cadangan pertambangan muncul secara global. Pernah menjadi pemasok nikel terbesar dunia, Indonesia memperkenalkan larangan ekspor bijih nikel untuk membangun industri EV dan baterai domestiknya. Studi ini meninjau peraturan pemerintah dan wawasan dari pemangku kepentingan utama: pemerintah, industri baterai, dan industri EV. Studi ini menyimpulkan bahwa enam faktor dapat mendukung inisiatif ini. Ini adalah: (1) harga, (2) teknologi, (3) kebijakan, (4) investasi modal, (5) infrastruktur, sosialisasi, dan pemasaran, dan (6) kepatuhan terhadap praktik dan sertifikasi berkelanjutan (Pandyaswargo et al., 2021).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu peraturan pemerintah dan wawasan dari pemangku kepentingan utama: pemerintah, industri baterai, dan industri EV dengan faktor yang mendukung seperti harga, teknologi, kebijakan, infrastruktur, dan sosialisasi
16	Tinjauan <i>World Trade Organization</i> (WTO) Terkait Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dan Uni Eropa Di Bidang Ekspor Nikel/ Komang Tri Saniartini, Hartana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni	metode penelitian hukum normatif	Akibat penghentian kegiatan ekspor nikel tersebut, Indonesia mendapat kecaman dari Uni Eropa karena kebijakan tersebut dinilai melanggar beberapa aturan yang sudah disepakati dalam <i>The General Agreement of Tarrifs and Trade</i> (GATT). Sebagai	Membahas mengenai Indonesia menghentikan kegiatan ekspor bijih nikel yang menyebabkan Uni Eropa menggugat Indonesia karena melanggar aturan WTO

Putu Rai Yuliantini, Elly Kristiani Purwendah/2023	organisasi perdagangan internasional, WTO memiliki wewenang terhadap penyelesaian sengketa perdagangan yang terjadi pada anggota negaranya. Sebuah sistem yang terkandung dalam kesepakatan organisasi perdagangan internasional tersebut terkait dengan cara menyelesaikan sengketa/Dispute Settlement Understanding (DSU) (Geovanie, 2021).
17 <i>Re-examining Indonesia's Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction/</i> Mikaila Jessy Azzahra, Yetty Komalasari Dewi/2022	metode penelitian hukum normatif Peraturam kementerian ESDM 11/2019 yang memberlakukan larangan ekspor bijih nikel dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan persyaratan pengolahan bijih nikel di dalam negeri, dapat dianggap melanggar UU WTO bagi sebagian orang. Hal ini mengingat Tindakan tersebut merupakan pembatasan atau pelarangan ekspor, yang diberlakukan melalui pembatasan dan pelarangan ekspor, dan telah sepenuhnya membatasi jumlah bijih nikel yang diekspor di Indonesia (Dewi & Mikaila Jessy Azzahra, 2022).
18 <i>An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel/</i> Adi Gunawan, Nadir/2022	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel memiliki peluang menang yang lebih besar. Kemungkinan memenangkan sengketa dalam hal ini dapat dilihat dari indikasi awal obyek sengketa berupa kekayaan

			alam Indonesia yang habis dan tidak dapat diperbaharui. Sekaligus diperkuat dengan perlindungan hukum internasional terhadap kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, sebagai hak setiap negara yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu oleh negara lain. Hal itu juga diperkuat dengan waktu dan sejarah Indonesia (Gunawan et al., 2022).	
19	Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)/ Nur Farra Ai'n Hassanah/2021.	Metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya yaitu deskriptif.	Adanya pengecualian terhadap pembatasan dan larangan ekspor berdasarkan aturan WTO dapat dilakukan. Diharapkan WTO dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan tidak merugikan masing-masing pihak (Hassanah, 2021).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu Uni Eropa menggugat Indonesia di World Trade Organization, karena Uni Eropa menganggap Indonesia sudah melanggar prinsip-prinsip dari aturan World Trade Organization (WTO).
20	Larang Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional/ Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf/2022	metode pendekatan yuridis normatif.	peraturan larangan ekspor Indonesia dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip larangan restriksi kuantitatif. Pelarangan ekspor bijih nikel sudah memenuhi kualifikasi utama dalam analisis ruang lingkup Pasal XI:1 GATT, dimana Indonesia memberlakukan peraturan yang memiliki efek limitasi bagi ekspor (Brier & lia dwi jayanti, 2020b).	Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan dan Pertambangan dan Mineral Batubara (Permen ESDM 11/2019) memutuskan untuk memberhentikan kegiatan ekspor bijih nikel mulai dari tanggal 1 Januari 2020.

21	Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Perihal Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional/ Salomo Ebeneizer Hasudungan/2022.	metode pendekatan, antara lain: pendekatan yuridis normative.	Pandangan demikian mungkin benar adanya. Pada umumnya, konsep atau draf pengaturan-pengaturan dan kaidah-kaidah hukum perdagangan internasional disusun oleh para ahli hukum dari negara maju. Negara berkembang ganya disodori rancangannya. Negara berkembang tidak begitu dapat membayangkan implikasi dari perjanjian yang mereka rundingkan. Setelah selang beberapa tahun berjalan, negara berkembang barulah sadar bahwa pengaturan-pengaturan tersebut merupakan liberalisasi perdagangan. Bahwa kemudian sengketa dagang antar negara merupakan suatu hal yang pasti terjadi (Salomo Ebeneizer Hasudungan, 2022).	Ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia ke Uni Eropa selama ini hanya yang berbentuk bahan mentah. Akan tetapi, dengan adanya “Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang mineral dan Batubara”, ekspor tersebut hanya dilakukan berupa nikel yang sudah mengalami proses pemurnian atau dengan kata lain bukan bahan mentah.
22	Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau Dari Persetujuan WTO/ Elsyie Stephi Yunecka/2022.	Penelitian hukum normatif	Indonesia tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan hukum WTO yang digugat oleh Uni Eropa yaitu article XI GATT 1994 mengenai quantitative restriction. Indonesia untuk membenarkan kebijakannya tersebut sudah berdasar pada Persetujuan WTO (Yunecka, 2022).	Uni Eropa mengajukan keluhannya ke World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia biasa digunakan oleh Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja nirkarat (stainless steel) Eropa.
23	Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian/ Khafidhotul Ilmi, Dyah	Metode kuantitatif deskriptif	Hubungan internasional bilateral antara Indonesia dan Uni Eropaberlangsung sangat ketat, halini di tandai dengan adanya permasalahan dagang dan adanya gugatan ke WTO dari Uni Eropaterhadap	Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel.

	Estu Kurniawati, Haryo Prasodjo/2022.		Indonesia, Sedangkan tantangan atas dasar kebijakan yang berdampak pada perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah kebijakan untuk meningkatkan belanja Negara, meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan pertimbangan keringanan pajak, pelaksanaan pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya (Ilmi et al., 2022).	Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada.
24	Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larang Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa Di WTO/ Anisa Dewi Syafira, Chikal Marlina Putri, Ekawati Widyarningsih, Putri Kusumawijaya /2023.	Metode penelitian normatif dan deskriptif.	Hubungan internasional bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa berlangsung sangat ketat, hal ini ditandai dengan adanya permasalahan dagang dan adanya gugatan ke WTO dari Uni Eropa terhadap Indonesia, Sedangkan tantangan atas dasar kebijakan yang berdampak pada perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah kebijakan untuk meningkatkan belanja Negara, meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan pertimbangan keringanan pajak, pelaksanaan pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya (Dan et al., 2022).	Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas untuk menegatkan jumlah ekspor guna menjaga kelestarian nikel yang ada sebab nikel merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebijakan pengetatan ekspor yang dilakukan dinilai merugikan banyak pihak, seperti pihak dari Uni Eropa yang memilih untuk melayangkan gugatan untuk Indonesia melalui <i>World Trade Organization</i> .
25	Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Penerapan Sistem	Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan	Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang	Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap

	Boarding Pass Di Gate Keberangkatan Terminal Terpadu Pulo Gebang/ Siti Sahara, Delvia Yuliana/2021	menyebarkan kuisioner kepada penumpang serta wawancara kepada para penumpang.	Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang diperuntukan sebagai tempat mengaturnya kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang/barang dan menjadi tempat perpindahan moda angkutan (SAHARA & Delvia Yuliana, 2021).	perorangan, masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu Negara.
26	Analysis of Factors Causing Delay in Unloading Imported Goods/Siti Sahara/2021.	Metode deskriptif kualitatif	Faktor yang mempengaruhi keterlambatan barang impor adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan persentase sebesar 80% dengan aspek <i>open-close hatch cover</i> dan peralatan <i>troubel quay</i> yang sangat berpengaruh terhadap keterlambatan barang impor dengan persentase sebesar 26% dan 41 % dari total faktor tak terkendali (Sahara, 2022).	Indikator efisiensi pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari penilaian efisiensi, volume total produksi nasional per kapita, struktur sektoral ekonomi nasional, produksi produk pokok per kapita, tingkat dan kualitas hidup, dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam proses produksi dan keputusan konsumsi.
27	Kedudukan Pemerintah Indonesia Terhadap <i>General Agreement on Tariffs And Trade</i> (GATT) Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel/ Dwi Okie Pangesti Agretino Wardana, Benny K. Heriawanto, Pinastika Prajna Paramita/2021	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif	Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Meratifikasi Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Jumlah negara pada awal berdirinya WTO sebanyak 154. Pada perkembangannya, anggota WTO sekarang ini telah mencapai 164 negara (Brier & lia dwi jayanti, 2020a).	Membahas Indonesia menjadi anggota resmi WTO

28	Dampak Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Ekspor dan Impor Indonesia/ Egi Regi Prayoga, M. Ryansyah, Nurul Jannah/2022	Metode penelitian yang digunakan adalah metode desk study	Dari salah satu kegiatan perekonomian, Kegiatan Ekspor sendiri memiliki peranan yang sangat penting pada perluasan pasar di berbagai negara. Ekspor adalah kegiatan atau kegiatan pengeluaran produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan dan ketentuan yang berlaku (Prayoga et al., 2022).	Membahas mengenai peran ekspor
29	Uji Beda Nilai Ekspor Nonmigas Di Indonesia Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Virus Corona/ Gabriela Melisa Tobing, Rorim Panday/2021	Data sekunder	Indonesia pun turut aktif dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama yang baik dan aktif dengan berbagai negara dan membentuk sebuah kesepakatan kerjasama (Gabriela Melisa Tobing, 2021).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kegiatan ekspor Indonesia dengan negara lain sebelum terjadinya pandemic covid-19
30	Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia/Sekar Wiji Rahayu, Fajar Sugianto/2020	Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode normatif dan bersifat deskriptif	Pelarangan ekspor tersebut tidak bertujuan sebagai penghambat perdagangan, namun sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Mengingat kekayaan mineral, termasuk nikel merupakan sumber daya yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui lagi, sudah waktunya bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dan secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan	Membahas tujuan pelarang ekspor bijih nikel untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa Indonesia dan memenuhi kebutuhan bahan baku smelter

				hilirisasi mineral tambang (Rahayu & Sugianto, 2020).	
31	Perdagangan Internasional Perspektif Islam; Studi Kasus: Dilema Pengembangan Ekpor Rumput Laut Di Kabupaten Bulukumba/Kaslam, Jumrah/2022	kualitatif deskriptif dengan pendekatan survei	Ketika suatu negara memiliki keunggulan absolut atas negara yang lain, dalam produksi satu produk tetapi kurang efisien atau memiliki kelemahan absolut terhadap negara lain dan memproduksi produk yang kedua, maka kedua negara dapat mendapatkan manfaat dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut (Kaslam & Jumrah, 2022).	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai perdagangan internasional dimana Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.	
32	Analisis Faktor Penyebab Kesalahan Penetapan HS Code (Studi Kasus: Impor Ball Valve PT. Global Cargo System)/ Siti Sahara, Winoto Hadi, Yuli Purnama Putra/2022	Metode deskriptif kuantitatif	Adanya perbedaan tarif yang disebabkan kesalahan dalam menetapkan pengklasifikasian kode barang dan tidak menambahkan data nilai asuransi sebesar 0.5% dalam format PIB. Akibat kekurangan pembayaran tarif pabean yang berpengaruh dalam penerimaan negara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5,000,000. Kesalahan terjadi karena adanya human error dalam menetapkan pengklasifikasian kode barang atau HS Code (Sahara et al., 2022).	Indonesia dengan negara lain menjalin hubungan kerjasama dalam menunjang stabilitas ekonomi Indonesia melalui kegiatan perdagangan internasional.	
33	Alternatif Rehabilitasi Terdegradasi pada Lahan Bekas	Teknik Lahan Galian Metode kualitatif	Indonesia memiliki sumber daya serta cadangan bauksit dan bijih nikel yang sangat besar. Namun,	Dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pengelolaan	

	Industri sekitar Tambang di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah/ Muhammad Bahtiyar Rosyadi, Novandri Kusuma Wardana /2019		sampai saat ini besarnya sumber daya tersebut belum memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan nasional, karena pemerintah kesulitan membuat kebijakan yang tepat mengenai pengelolaan sumber daya tersebut yang dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan (Rosyadi & Wardana, 2019).	sumber daya yang dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan
34	Optimalisasi Penggunaan Forklift Terhadap Kelancaran Proses Bongkar Steel Coil Di PT Daisy Mutiara Samudra/ Siti Sahara, Annas Ruli Pradana/2021.	Metode penelitian yang digunakan penelitian ini bersifat kuantitatif.	Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa forklift pada bulan Januari sebesar Rp. 130.200.000, sedangkan pada bulan februari sebesar Rp. 133.800.000. Jumlah pengeluaran tersebut tentu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan forklift perbulan. Apabila perusahaan membeli 1 Unit forklift 15 ton, maka perusahaan akan menghemat pengeluaran sebesar Rp. 7.600.000 - Rp. 12.000.000 (Sahara & Annas Ruli Pradana, 2021).	Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
35	Optimalisasi Kegiatan Trucking di PT Jasa Prima Logistik Bulog/ Siti Sahara, Rachel Jesica Silitonga/2022.	Metode kualitatif dengan proses pengambilan data melalui wawancara, dan studi literasi	Faktor penyebab kurang optimalnya kegiatan trucking adalah kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pihak operasional trucking sehingga armada tidak digunakan secara maksimal, inspeksi terhadap armada trucking tidak dapat dilaksanakan	Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang sanggup untuk mendistribusikan barangbarang yang dibutuhkan.

secara akurat, serta penggunaan armada yang difokuskan untuk kegiatan eksternal (Sahara & Jesica, 2022).

36	Konflik Indonesia Dengan Uni Eropa (UE) Dan Dampaknya Terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia di Paris Agreement/ Djoesept Harmat Tarigan, Pradono Budi Saputro/2022	Metode penelitian kualitatif	Larangan ekspor bijih nikel ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, atau dua tahun lebih cepat dari rencana semula. Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) tentunya berdampak terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement. Hal tersebut dapat terjadi karena Indonesia dianggap tidak memperhatikan lingkungan dalam hal pengelolaan kelapa sawit (Harmat Tarigan & Budi Saputro, 2022).	Hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa (UE) semakin memanas, usai kebijakan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel digugat UE ke World Trade Organization (WTO). Uni Eropa(UE) secara resmi menggugat kebijakan Indonesia atas larangan ekspordan pembebasan bea masuk bagi industri di sektor mineral dan batubara (minerba).
----	--	------------------------------	---	---

D. Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Meratifikasi Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Jumlah negara pada awal berdirinya WTO sebanyak 154. Pada perkembangannya, anggota WTO sekarang ini telah mencapai 164 negara (Brier & lia dwi jayanti, 2020a). *World Trade Organization* (WTO) merupakan kelanjutan dan pengembangan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan *level playing field* bagi para anggotanya dalam bidang perdagangan internasional. Sehingga berkembangnya hubungan perdagangan internasional maupun sengketa perdagangan internasional pasti muncul, salah satunya mengenai sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang dimulai pada tahun 2018 ketika Parlemen Eropa atau mayoritas Parlemen Eropa memutuskan untuk menyetujui rencana pelarangan perdagangan Indonesia. Biodiesel berbasis minyak sawit pada tahun 2021, sebagai tanggapan atau tindakan balasan atas diskriminasi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan larangan ekspor berlaku untuk bijih mentah yang belum melalui proses pemurnian. Pemerintah telah membatasi kadar nikel yang diperbolehkan untuk diekspor melalui Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2019 di bawah 1,7%. 20 Namun, pada tahun 2019, larangan ekspor nikel dipercepat mulai 1 Januari 2020. Sejak kebijakan tersebut diundangkan, salah satu yang menjadi sorotan publik adalah Uni Eropa telah mengajukan gugatan kepada WTO atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, dengan nomor sengketa DS592. Uni Eropa menuduh bahwa Indonesia telah melanggar Pasal XI:1 Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, Pasal 3.1(b) Persetujuan Subsidi dan Tindakan Imbalan tentang larangan subsidi, dan Pasal XI:1 UU No. GATT 1994, karena Indonesia tidak menerbitkan secara tepat waktu tindakan penegakan umum yang terkait dengan pelaksanaan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor (Azis & Abrianti, 2021). Beberapa argument yang dapat dibuktikan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan uni Eropa ini, antara lain :

1. Indonesia bisa membuktikan bahwa masih cukup besarnya pasokan bijih nikel dari negara-negara di dunia, selain Indonesia. Data Nickel Institute di 2021 menunjukkan ada 10 negara yang menguasai 77 persen sumber daya nikel di dunia. Indonesia sendiri porsinya memiliki sumber daya nikel mencapai 11 persen. Tetapi negara lain juga cukup memiliki sumber daya nikel yang besar, seperti Australia mencapai 15 persen, Afrika Selatan 11 persen, Rusia 8 persen, Kanada 7 persen, Filipina 6 persen, Brazil 6 persen, Kuba 5 persen, Kaledonia Baru 5 persen, dan China 2 persen. Indonesia dapat menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikelnya tidak sepenuhnya mengguncang pasokan bijih nikel dunia, karena masih cukupnya pasokan dari negara-negara lain.
2. Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang telah diolah dan dimurnikan, sehingga produsen barang berbasis nikel dunia tidak akan kehilangan bahan baku, melainkan hanya mengurangi satu rantai produksinya saja. Pabrik pengolahan nikel di Uni Eropa maupun di negara-negara industri lain tidak akan sepenuhnya terhenti akan tetapi hanya mengurangi satu tahapan produksinya saja.
3. Indonesia perlu memastikan kecukupan pasokan bagi kebutuhan domestik, terutama bagi pelaku smelter yang telah berinvestasi di Indonesia. Pada 2020 setidaknya ada 13 smelter di Indonesia dan di 2021 akan tambah 3 smelter lagi yang akan beroperasi. Indonesia dapat menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikel juga diperlukan untuk menjamin kecukupan pasokan domestik.

Disamping 3 argumen yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia, masih ada 2 hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yaitu pertama, pemerintah perlu memikirkan lebih lanjut agar rantai nilai domestik tidak hanya berhenti pada produk dari smelting, tetapi produk turunan lanjutan lainnya. Untuk itu perlu dipelajari insentif apa saja yang diperlukan untuk menarik investasi pada industri pengolahan nikel yang lebih hilir. kedua diperlukan pula konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini (Yosefi, 2023).

Uni Eropa menganggap bahwa tindakan Indonesia dalam melarang ekspor bijih nikel sebagai tindakan yang mampu memicu perang dagang internasional, karena menghambat proses perdagangan di antara kedua negara. Namun perlu diketahui bahwa pelarangan ekspor tersebut tidak bertujuan sebagai penghambat perdagangan, namun sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Mengingat kekayaan mineral, termasuk nikel merupakan sumber daya yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui lagi, sudah waktunya bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dan secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan hilirisasi mineral tambang. Indonesia tidak mungkin terus menerus mengandalkan pajak sebagai pemasukan negara. Indonesia harus mampu berdiri sendiri dan mampu mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara secara mandiri tanpa bantuan pihak asing. Saat ini Indonesia dinilai telah mampu untuk memproduksi sendiri bahan mineral mentah menjadi bahan jadi, dilihat dari jumlah smelter yang telah berdiri dan mampu beroperasi tahun 2020. Apabila pengolahan dapat dioptimalkan, hilirisasi nikel akan terbentuk dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia karena nilai berbagai produk tambang jadi yang telah diolah memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai bahan tambang mentah yang di ekspor. Sehingga dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar dan secara perlahan mampu untuk bersaing dalam pasar global dalam hal pertambangan (Rahayu & Sugianto, 2020).

**Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
Perkembangan Ekspor Non Migas Terhadap Produksi Biji Nikel Indonesia Tahun 2019-2021**

Dari salah satu kegiatan perekonomian, kegiatan Ekspor memiliki peranan yang sangat penting dalam perluasan pasar ke berbagai negara. Ekspor suatu kegiatan pengeluaran produk ataupun barang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai standar peraturan dan ketentuan yang berlaku setiap negara. Kegiatan ekspor pada umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut telah dipenuhi di dalam negeri (Prayoga et al., 2022).

Nilai Ekspor NonMigas (Juta US\$), 2019-2021

Komponen Ekspor	Tahun	Jumlah
Non Migas	2019	155 893,7
Non Migas	2020	154 940,7
Non Migas	2021	219 362,1

Tabel 1. Nilai Ekspor Non Migas (Juta US\$), 2019-2022

Sumber: Publikasi Statistik

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/2/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html>

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa ekspor non-migas di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilai ekspor non-migas mengalami penurunan ke tahun 2020 sebesar 154 940,7 US\$ Juta. Ekspor non migas tahun 2021 sebesar 219 362,1US\$ Juta. Ekspor merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam perluasan pasar dan akan mendorong sektor industri lainnya serta perkembangan ekonomi. Penyebab terjadinya fluktuasi ekspor non migas diakibatkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor sesungguhnya sama dengan faktor yang mempengaruhi impor yaitu pendapatan negara lain, harga relatif antar negara dan selera, kebijaksanaan perdagangan akan mempengaruhi volume ekspor negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang akan berdampak pada naik turunnya nilai ekspor non migas.

Kegiatan pertambangan di Indonesia berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi perkembangan domestik. Manfaat tersebut berupa tambahan bagi Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Rumah Tangga dan kesempatan kerja pada tingkat nasional maupun regional. Adapun hasil tambang Indonesia itu adalah produksi biji nikel terbesar kelima di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam bidang pertambangan. Salah satu komoditi pertambangan Indonesia yang memberikan kontribusi pada neraca ekspor Indonesia adalah biji nikel. Potensi nikel dalam jumlah besar dan terus bertambah sehingga dalam proses produksi dan eksplorasinya harus tepat dan ramah lingkungan agar memiliki nilai ekonomi tinggi. Tambang itu merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah di Indonesia (Dr. Atik Krustiyati, S.H. & Adam Surya, 2022). Setiap kenaikan produksi harus di sertai dengan adanya peningkatan luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan investasi pemerintah atau pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor ini. Jika produksi meningkat maka volume ekspor juga meningkat Dengan peningkatan produksi maka akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan sebagian dari produksi tersebut dapat di ekspor. Peningkatan ekspor ini akan menyebabkan pendapatan negara berupa mata uang asing (devisa) menjadi meningkat ini akan dikembalikan ke dalam faktor pendukungnya seperti ijin pengembangan pembukaan areal pertambangan akan lebih mudah, peningkatan sumber daya manusia yang di biyai oleh pemerintah mengingat bijih nikel sangat prospektif serta di mancanegara dan juga pemerintah akan membangun fasilitas pendukung sektor pertambangan seperti teknologi modern dalam pengolahan hasil – hasil tambang agar efisien. Berikut data badan pusat statistik terhadap Produksi Barang Tambang Mineral 2019-2021

Barang Tambang Mineral	Produksi Barang Tambang Mineral		
	2019	2020	2021
Batu Bara	616.154.054	565.640.928	614.058.577
Bauksit	16.592.187	25.859.895	25.781.187
Nikel	-	-	-
Emas	108.977	65.890	78.996
Perak	-	-	-
Granit	-	-	-
Pasir Besi	2.507.786	-	-
Konsentrat Tin	86.947	65.127	52.467
Konsentrat Tembaga	1.697.725	2.273.456	3.377.023
Bijih Nikel	60.948.143	48.040.003	65.509.854

Tabel 1. Produksi Barang Tambang Mineral 2019-2021

Sumber: Publikasi Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>

Melihat sejauh mana Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memberikan nilai tambah pada setiap jenis mineral dan batu bara contohnya pada satu jenis ekspor mineral dari jenis bijih nikel. Pada tahun 2019 sebelum, ekspor bijih nikel Negara Indonesia telah mencapai 60,9 juta ton dengan penerimaan terhadap Indonesia sebesar US\$ 30 per ton. Artinya, secara keseluruhan Indonesia mendapatkan pemasukan sebesar US\$ 1,82 Milyar. Namun, jika saja bijih nikel tersebut memasuki tahap pemurniaan (diolah menjadi barang setengah jadi) terlebih dahulu maka penerimaan yang didapat oleh Indonesia bisa mencapai 10 kali lipat. Hal itu berarti pendapatan yang akan diterima adalah US\$ 300 per ton dikalikan dengan jumlah pencapaian 60,9 juta ton yaitu menjadi US\$ 18, 28 Milyar. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan, maka tidak heran apabila Pemerintah benar benar merealisasikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2019.

Peraturan larangan ekspor nikel ini juga mempengaruhi rencana investasi. Larangan ekspor ini pada jangka pendek memang akan membatasi kegiatan ekspor Indonesia, namun dalam jangka Panjang akan meningkatkan investasi pembangunan smelter di Indonesia, mengingat terdapat juga kewajiban pemrosesan dalam negeri. Dengan ini, industri hilir Indonesia tentunya akan meningkat dari sebelumnya, investasi pembangunan smelter juga berpengaruh akibat tidak adanya bijih nikel yang diberikan kepada negara lain, jadi Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk memprosesnya Mengenai potensi ketidakpastian dalam harga, EU menyampaikan dalam permohonan konsultasinya bahwa tindakan larangan ekspor nikel dari Indonesia ini berpotensi mengurangi pasokan nikel global dan menaikkan harga bijih nikel itu sendiri (Brier & lia dwi jayanti, 2020b). Beberapa negara yang mulai berencana berinvestasi nikel di Indonesia adalah Tiongkok dan Korea Selatan. Sedangkan Volkswagen serta Ford masih dalam tahap negosiasi.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentu menimbulkan kontra dalam pelaksanaannya terutama bagi investor asing karena secara otomatis harga jual nikel yang berasal dari Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Namun dengan diterbitkannya peraturan ini tidak semata-mata membuat laju Investasi ke Indonesia menjadi terhambat. Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memberikan nilai tambah pada setiap jenis tambang mineral dan batu bara contohnya pada satu jenis ekspor tambang mineral dari jenis bijih nikel. Pada tahun 2019, ekspor bijih nikel Negara Indonesia telah mencapai 60,9

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
 juta ton dengan penerimaan terhadap Indonesia sebesar US\$ 30 per ton. Artinya, secara keseluruhan Indonesia mendapatkan pemasukan sebesar US\$ 1,82 Milyar. Namun, jika saja bijih nikel tersebut memasuki tahap pemurniaan (diolah menjadi barang setengah jadi) terlebih dahulu maka penerimaan yang didapat oleh Indonesia bisa mencapai 10 kali lipat. Hal tersebut menunjukkan pendapatan yang akan diterima adalah US\$ 300 per ton dikalikan dengan jumlah pencapaian 60,9 juta ton yaitu menjadi US\$ 18,28 Milyar. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan, maka tidak heran apabila Pemerintah bertindak untuk merealisasikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2019.

Pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan berikut juga dengan memberikan kemudahan dari segi perizinan dan juga fasilitas-fasilitas (*privilege*) kepada investor terkait penanaman modal baik itu dari dalam negeri ataupun asing. Namun saat ini Indonesia masih membutuhkan pendanaan terkait pembangunan smelter (pemurnian), pembangunan PLTU sebagai penggerak utama dari mesin pengolah nikel, tenaga ahli serta pelatihan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pengolahan nikel dengan baik yang tentunya membutuhkan dana yang sangat banyak. Dalam rangka percepatan ekonomi dan pembangunan pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan mewajibkan semua perusahaan tambang di Indonesia untuk mengolah hasil tambang dan melarang ekspor bahan mentah untuk menaikkan harga pasar di Internasional dan menambah devisa negara dengan kedepannya lebih meningkatkan penggunaan energi baru.

F. Daftar Pustaka

- Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), 4009–4020. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3085>
- Azis, V. A. A., & Abrianti, S. (2021). Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.10358>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020a). *Kedudukan Pemerintah Indonesia Terhadap General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt) Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020b). *Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Dan, R., Hidup, G., & Perilaku, T. (2022). *Jurnal ekonomina*. 1(September).
- Desya, C. S. (2017). Management Journal. *Fundamental Management Journal*, 2(1), 5–12. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jm/article/view/993>
- Dewi, Y., & Mikaila Jessy Azzahra. (2022). Re-examining Indonesia's Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction? *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(2), 180–200. <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.797>
- Dr. Atik Krustiyati, S.H., M. ., & Adam Surya, S. H. (2022). Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa. *Dinamika Hukum Sumber Daya Alam*, 121–133.

- Fachriyahthul Jannah, Husnul Muamilah, M. I. Y. (2023). *Pengaruh Perubahan Harga Nikel dan Nilai Kurs Terhadap*. *XIII*(1), 73–81.
- Gabriela Melisa Tobing, R. P. (2021). Uji Beda Nilai Ekspor Nonmigas Di Indonesia Sebelum Dan. *Researchgate.Net*, *January*. https://www.researchgate.net/profile/Gabriela-Melisa-Tobing-2/publication/348295375_Uji_Beda_Nilai_Ekspor_Nonmigas_Di_Indonesia_Sebelum_Dan_Saat_Terjadinya_Pandemi_Virus_Corona/links/5ff6961e92851c13fef33e73/
- Geovanie, D. G. (2021). Jurnal locus delicti. *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id*, *2*(April), 1–12.
- Gunawan, A., Pamekasan, M., Raya, J., & Km, P. (2022). *An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel : Strengthening Indonesia ' s Opportunities from the European Union ' s Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel*. *11*(2), 408–418.
- Harmat Tarigan, D., & Budi Saputro, P. (2022). Konflik Indonesia Dengan Uni Eropa (Ue) Dan Dampaknya Terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia Di Paris Agreement. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(5), 595–606. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.67>
- Hassanah, N. F. A. (2021). ... Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto)(Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, *1*, 1–12. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925>
- Ilmi, K., Kurniawati, D. E., & ... (2022). Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian. *Journal of Business and ...*, *3*(2), 181–185. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1684>
- Kaslam, & Jumrah. (2022). Perdagangan Internasional Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, *24*, 233–251.
- Lim, B., Kim, H. S., & Park, J. (2021). Implicit interpretation of indonesian export bans on lme nickel prices: Evidence from the announcement effect. *Risks*, *9*(5), 1–7. <https://doi.org/10.3390/risks9050093>
- Mitrania, R., Tampubolon, M., & Panjaitan, E. (2021). *The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law*. *December*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312876>
- Nugroho, A. S. (2022). Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, *6*(1), 98–113. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1563>
- Nurbaiti, M. Sidik Boedoyo, P. Y. (1945). *Ketahanan Energi Indonesia Nickel Management On State Defense And Energy Neraca Perdagangan Indonesia*. 33–52.
- Pandyaswargo, A. H., Wibowo, A. D., Maghfiroh, M. F. N., Rezqita, A., & Onoda, H. (2021). The emerging electric vehicle and battery industry in Indonesia: Actions around the nickel ore export ban and a SWOT analysis. *Batteries*, *7*(4). <https://doi.org/10.3390/batteries7040080>
- Prayoga, E. R., Ryansyah, M., & Jannah, N. (2022). Dampak Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
 Sektor Ekspor dan Impor Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 457–465.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.924>

Puspita, N. Y., Nadeak, E., & Hervino, A. D. (2022). *Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources D Alam Perdagangan Internasional*. 5(November), 504–525.

Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224–236. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>

Rosyadi, M. B., & Wardana, N. K. (2019). Alternatif Teknik Rehabilitasi Lahan Terdegradasi pada Lahan Bekas Galian Industri sekitar Tambang di Kabupaten. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi XIV Tahun 2019 (ReTII)*, 2019(November), 107–112. <https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/1520/886>

Sahara, S. (2022). Analysis of Factors Causing Delay in Unloading Imported Goods. *Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021)*, 210(Best 2021), 345–351. <https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.051>

Sahara, S., & Annas Ruli Pradana. (2021). Optimalisasi Penggunaan Forklift Terhadap Kelancaran Proses Bongkar Steel Coil Di Pt. Daisy Mutiara Samudra. *Logistik*, 14(1), 57–68. <https://doi.org/10.21009/logistik.v14i1.20508>

Sahara, S., & Delvia Yuliana. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Penerapan Sistem Boarding Pass Di Gate Keberangkatan Terminal Terpadu Pulo Geban. *Logistik*, 14(1), 44–56. <https://doi.org/10.21009/logistik.v14i1.20507>

Sahara, S., Hadi, W., & Ptra, Y. R. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kesalahan Penetapan HSCode(Studi Kasus : Impor Ball ValvePT. Global Cargo System). *Jurnal Logistik*, 15(1), 49.

Sahara, S., & Jesica, R. (2022). *Optimalisasi Kegiatan Trucking di PT Jasa Prima Logistik Bulog*. 15(02), 120–134.

Salomo Ebenezer Hasudungan. (2022). Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Perihal Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Journal Information*, 10, 1–16.

Siahaan, D. M. T., Sagio, I., & Purwanti, E. (2021). Export Restrictions of Indonesian Nickel Ore Based on the Perspective of Quantitative Restriction Principles in General Agreement on Tariffs and Trade. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 409. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.409-418>

Yehezkiel. (2021). *Gugatan Eu Di Wto Terkait Kasus Ekspor Bijih Nikel Indonesia Eu Law At Wto Regarding Export Case Indonesian Nickel Ore*. December.

Yosefi, S. W. (2023). *Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization*. 6(1), 1–14.

Yuneka, E. S. (2022). *Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau Dari Persetujuan WTO*. 1–23.